

# PERENCANAAN KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN DANA DESA

**Adli**

Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Selatan

## ***Abstract***

*Good communication planning will form a consensus and a good community development process. The birth of community participation is an encouragement of satisfaction from the community so that they are able to be involved in development materially and morally. This research was conducted with the aim to see communication planning and community participation in village fund management. This study uses a qualitative method and with a descriptive approach with the information involving village officials and community leaders. The results of his research that participation by the community consists of 3 forms, namely labor, social participation and ideas. Each manifests itself in attitudes to decision making, participation in labor-intensive activities and mutual cooperation in village development meetings.*

***Keywords:*** *communication planning, community participation, village funds.*

## **Abstrak**

Perencanaan komunikasi yang baik akan membentuk konsensus dan proses pembangunan masyarakat yang baik. Lahirnya partisipasi masyarakat merupakan dorongan kepuasan dari masyarakat sehingga mampu terlibat dalam pembangunan secara materil maupun moril. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat perencanaan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif dengan informannya melibatkan para perangkat desa dan tokoh masyarakat. Adapun hasil penelitiannya bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat terdiri dari 3 bentuk yaitu partisipasi tenaga, sosial dan gagasan. Masing-masing terwujud dalam sikap pada pengambilan keputusan, partisipasi dalam kegiatan padat karya serta bergotong royong dalam musyawarah pembangunan desa.

***Kata Kunci:*** *perencanaan komunikasi, partisipasi masyarakat, dana desa.*

## PENDAHULUAN

Komunikasi menjadi langkah kerja dalam setiap kelompok dalam melaksanakan proses pembangunan. Kesesuaian pendekatan atau cara dalam mensosialisasikan program pembangunan akan memberi kemudahan dalam menjangkau aspirasi dan partisipasi masyarakat mengenai sasaran pembangunan pada umumnya. Kondisi masyarakat yang multi-perspektif termasuk salah satu kendala dalam menjalankan program-program pembangunan baik pada level masyarakat baik di kota maupun di desa.

Sejak hadirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, multi komponen dalam setiap pemanfaatan anggaran dana desa mulai diatur oleh pemerintah sehingga menimbulkan tatanan baru dalam kehidupan masyarakat desa. Adapun kebiasaan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada level desa umumnya dilakukannya musyawarah. Karena dianggap memiliki nilai demokrasi dan terbuka dalam konteks kehidupan sosial pembangunan.

Penyusunan rencana agenda pembangunan masyarakat termasuk hal yang diperhatikan dalam musyawarah. Pemerintah desa sebagai pelaku pembangunan harus tanggap terhadap pesan-pesan yang berkembang dalam masyarakat suatu desa, sehingga mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat. Strategi penyampaian pesan pengelolaan Dana Desa menjadi cakupan tanggung jawab pemerintah desa untuk menerima dan memahami sasaran penggunaan Dana Desa.

Musyawarah desa menjadi media perumusan perencanaan pembangunan masyarakat setiap tahunnya. Meskipun sering dilakukan, keputusan pembangunan bersifat *top-down* dan hasil pembangunan masih menyisakan polemik dikalangan masyarakat. Sejak program Dana Desa dimulai pada tahun 2015 banyak persoalan yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan Dana Desa.

Masalah komunikasi merupakan contoh yang muncul dari sejumlah proses pengelolaan Dana Desa. Desa Seureumo Kecamatan Indrapuri yaitu salah satu desa yang memiliki persoalan tentang hal tersebut. Terdapat beberapa permasalahan komunikasi yang dipandang belum efektif hubungan dikalangan pemerintah desa dan juga masyarakat.

Masyarakat sebagai pengawas dalam pembangunan pengelolaan Dana Desa. Hal ini tidak terlepas dari perencanaan komunikasi yang dibangun dalam jajaran pemerintahan desa. Perihal mendasar dalam sebuah organisasi adalah komunikasi, dimana ia membentuk sebuah atmosfer semangat kebersamaan guna mencapai sebuah tujuan atau kesepakatan bersama.

Perencanaan komunikasi merupakan perangkat pemilihan arah komunikasi yang tepat dan hasil identifikasi dari sebuah kesadaran akan kebutuhan dan strategi menjalankan pesan (Cook, *et.al*, 2014). Langkah-langkah tepat yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif tentu memiliki kendala didalamnya. Pembangunan merupakan perubahan cara dalam pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Menurut Susanto (dalam Anwas, 2008)

menyebutkan bahwa kata kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri. Konsep-konsep pembangunan diatas memiliki kaitannya dengan masyarakat, dimana masyarakat termasuk subjek serta objek pembangunan. Keterlibatan masyarakat (partisipasi) termasuk faktor pendukung pembangunan itu sendiri.

Partisipasi masyarakat menurut Craig dan May (dalam Hikmat, 2004) merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Lebih lanjut Hikmat (2004) menjelaskan bahwa pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan menciptakan pembangunan pada rakyat. Pada prinsipnya, partisipasi adalah masyarakat yang berperan aktif dalam proses dan tahapan program dan pengawasannya, yang dimulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil (PNPM Mandiri, 2017).

Komunikasi dalam konsep partisipasi didefinisikan sebagai proses dialog yang dinamis, interaksional, dan transformatif antar individu, kelompok masyarakat, dan institusi yang memungkinkan bagi masyarakat baik secara individu maupun kolektif untuk menyadari potensi mereka dan dilibatkan dalam membentuk kesejahteraan mereka sendiri (Sighal, 2004). Komunikasi dalam pendekatan partisipatoris tidak mengedepankan prinsip *sender-message-channel-receiver*, namun lebih menekankan model komunikasi horizontal (*two way communication*), keterbukaan pada dialog, menilai suatu resiko, mengidentifikasi solusi dan mencari konsensus pada aksi (Mefalopulos, 2008).

Tiga alasan menurut Conyers (1991) bahwa partisipasi masyarakat itu penting antara lain; *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk-beluk program tersebut dan akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program tersebut. Alasan *ketiga* adalah mendorong lahirnya partisipasi umum di sejumlah negara karena timbul anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan konsep *man-centered development* yaitu pembangunan yang diarahkan pada perbaikan nasib manusia.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk bersama memecahkan berbagai persoalan. Beragam pemaknaan terhadap partisipasi telah disinggung oleh sejumlah ahli diatas. Secara sederhana bahwa makna partisipasi adalah bentuk keikutsertaan pribadi maupun kelompok dan juga masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan (Laksana, 2008). Pemaknaan tersebut lahir atas dasar masyarakat sebagai subjek pembangunan yang mampu memberikan kontribusi dalam bentuk moril maupun materil untuk menunjang kesuksesan program pembangunan. Partisipasi dalam bentuk materil berupa uang, harta

benda dan barang yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan partisipasi moril berupa gagasan dan ide, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah (2008) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Partisipasi buah pemikiran yang diberikan dalam *anjang sono*, pertemuan atau rapat;
2. Partisipasi tenaga yang diberikan para masyarakat dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi yang lain dan sebagainya;
3. Partisipasi harta benda yang diberikan orang lain dalam kegiatan pembangunan desa, pertolongan untuk masyarakat lain bisa berupa uang, makanan, dan lain sebagainya;
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran yang diberikan seseorang untuk mendorong ragam usaha dan industri;
5. Partisipasi sosial, yang diberikan berupa simbol keguyuban atau kebersamaan.

Kemampuan pemerintah memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan langkah maju, akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan pemerintah masih mengalami masalah dan hambatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan studi yang dilakukan seseorang dalam mengkaji suatu masalah dengan hati-hati dan sempurna sehingga melahirkan suatu cara pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut (Nazir, 1988).

Mengacu pada teori dan obyek yang ada dalam penelitian ini, penulis memilih metode kualitatif dalam pendekatan deskriptif sebagai langkah pengkajiannya. Menurut Kaelan (2012) metode ini merupakan metode yang menekankan pada sisi kualitas secara alamiah karena menyangkut pengertian, konsep, nilai, serta ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian yang tidak melakukan perhitungan dalam melakukan justifikasi epistemologis. Kemudian mendeskripsikan pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan atau melukiskan keadaan obyek maupun subyek penelitian, seperti lembaga, individu, masyarakat dan lain lain, berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya pada saat sekarang ini (Nawawi, 1993).

Penelitian ini mengamati komunikasi aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Aparatur desa disini berperan sebagai subjek dalam pengelolaan Dana Desa. Konsep dan nilai nilai yang lahir dalam proses pengelolaan Dana Desa akan menjadi sumber informasi dan data dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Komunikasi dalam Pengelolaan Dana Desa**

Perencanaan strategi komunikasi dalam pengelolaan Dana Desa sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan fungsi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Prinsip partisipatif merupakan amanah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Partisipatif pada konteks komunikasi dalam pengelolaan Dana Desa

merupakan keterlibatan lembaga desa dan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil pengamatan, program Dana Desa telah dimulai sejak tahun 2015, namun peran aktif masyarakat masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan desa termasuk musyawarah perencanaan. Rendahnya keterlibatan masyarakat ini merupakan indikator yang memberi sinyal terhadap komunikasi pada internal desa tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap keputusan dalam pengelolaan program.

Partisipasi masyarakat Gampong Seureumo berada pada tingkatan sedang, dimana pada level ini memungkinkan masyarakat yang semula tidak mendengarkan pendapatnya, namun saat ini sudah memiliki suara. Akan tetapi pada tingkatan ini tidak ada jaminan bahwa suara masyarakat akan semua diakomodir oleh pemerintah desa.

Tingkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desain strategi komunikasi berada pada tahap kedua. Dimana masyarakat ikut memberikan aspirasi, mendapatkan informasi, membuat keputusan bersama dan mendukung aktivitas bersama. Jika melihat pada apa yang telah dikemukakan dalam teori Wilcox (dalam Artha, 2018) bahwa derajat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa diukur pada informasi yang berkembang, konsultasi masyarakat, pembuatan keputusan bersama, bekerja bersama, serta mendukung aktivitas bersama. Sehingga konsep padat karya tunai cocok untuk diterapkan dalam desain strategi komunikasi aparatur desa pada pengelolaan Dana Desa yang mampu merangkum apa yang dikemukakan oleh Wilcox dalam pemanfaatan potensi sumber daya desa.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama realisasi program penyaluran Dana Desa. Pada tahun tersebut terdapat sejumlah mekanisme dalam program ini yang masih belum diatur dengan baik, termasuk didalamnya sosialisasi program dan pendamping program itu sendiri. Bentuk ketidaksiapan ini terlihat pada pemanfaatan tenaga pendamping dari eks program PNPM, karena secara regulasi program hampir sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang PLD, beliau menyebutkan bahwa

“Pada tahun pertama terdapat sejumlah mekanisme yang belum tersosialisasi dengan baik seperti penyaluran dana, penegasan prioritas penggunaan dana dan lain-lain. Ditambah lagi sumber daya manusia di desa yang belum siap dengan program pemerintah tersebut. Maka ini memakan waktu setahun sampai dengan dua tahun untuk menjadikan program ini benar-benar tepat sasaran, dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pemerintah” (JM, 9/2018).

Kendala pada tahun pertama program adalah minimnya tingkat sosialisasi program yang diselenggarakan oleh pengelola program yaitu Pemerintah Kabupaten hingga Desa. Partisipasi yang diharapkan oleh pemerintah dari masyarakat secara tidak langsung berdampak kurang baik pada tahun pertama seperti rendahnya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam musyawarah. Hal ini mungkin terjadi karena kebijakan yang masih bersifat *top-down* sehingga berdampak pada penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

### **Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Gampong Seureumo, Aceh Besar.**

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang tidak terpisah dari sebuah upaya pemberdayaan, karena partisipasi merupakan wujud kesatuan dalam proses pemberdayaan masyarakat dan sumber perkembangan partisipasi dalam pembangunan erat kaitannya dengan wacana kelompok. Salah satu asumsi dari wacana kelompok yaitu masyarakat bukanlah sekumpulan orang-orang bodoh yang hanya bisa melakukan kemajuan jika mereka mendapatkan perintah (instruksional) dan hanya menjadi objek pembangunan.

Menurut Huraerah (2008) terdapat lima partisipasi masyarakat yang bisa dijumpai dalam masyarakat pedesaan yaitu partisipasi buah pikiran (gagasan), tenaga, harta-benda, keterampilan (*skill*), dan partisipasi sosial. Bentuk partisipasi dalam menyusun strategi komunikasi sangat beragam di kalangan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk partisipasi yang dapat menyatukan antar masyarakat dalam membangun desa adalah gotong royong. Kegiatan gotong royong biasa ditemui dalam banyak kegiatan masyarakat, misalnya membangun rumah bagi warga yang ditimpa musibah, membantu warga yang melakukan hajatan, serta pembangunan sarana dan prasarana umum. Namun aktivitas tersebut mulai menurun karena faktor kesibukan dan faktor lain yang cenderung bersifat individual sehingga partisipasi masyarakat berdampak pada iklim sosial.

Adapun beberapa bentuk partisipasi masyarakat Gampong Seureumo dalam mendesain strategi komunikasi aparatur desa pada pengelolaan Dana Desa yaitu dalam bentuk tenaga, gagasan, dan partisipasi sosial ;

#### 1. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Gagasan

Berdasarkan hasil wawancara cara dengan salah seorang Tokoh Perempuan:

“Jika kami mendapat undangan rapat kami hadir. Setidaknya tahu apa saja yang menjadi usulan warga secara umum. Pastinya yang berbicara dalam rapat umum juga itu-itu saja dan yang lain hanya mendengar. Hanya datang dan dengar saja” (MA, 9/2018).

Masyarakat secara umum belum mampu memberikan usulan pembangunan secara menyeluruh dalam musyawarah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu faktor yang mendasari *problem* dalam memberikan usulan secara tidak langsung adalah kurangnya informasi terkait Dana Desa. Kehadiran mereka dalam rapat/musyawarah desa hanya dalam rangka memenuhi undangan (mendengar) dan yang ikut menyampaikan usulan biasanya orang-orang yang memang terlibat dalam kegiatan desa. Ini merupakan tingkat partisipasi terkecil dari masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 menyatakan bahwa transparansi informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan di tingkat pemerintahan desa dan masyarakat desa. Adapun transparansi ini ditujukan untuk menciptakan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Kemudian dalam wawancara dengan salah seorang Tokoh Pemuda ia menyebutkan bahwa:

“Kami pernah mengusulkan (dalam musyawarah) untuk diadakannya pelatihan servis AC. Usulan ini karena melihat peluang yang ada di daerah ini hampir

semua kantor dan rumah sudah mulai menggunakan AC dan ini merupakan peluang bagi pemuda desa. Akan tetapi setelah program ini di plotkan anggarannya dan mau diadakan dan ternyata tidak ada peminatnya”(YI, 9/2018).

Dua hasil wawancara di atas menggambarkan orang-orang yang terlibat dalam musyawarah. Dalam hal ini, mereka turut memberi gagasan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa. Partisipasi dalam bentuk gagasan tersebut merupakan wujud keterlibatan mereka yang berdasarkan pada kemauan untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan agar tepat sasaran. Adapun bentuk komunikasi pada tingkat desa lebih masyhur dengan model “*anjang sana*”. Menurut Effendy (2008) dalam buku *Dinamika Komunikasi* bahwa “*anjang sana*” merupakan cara berkomunikasi khas Indonesia yang sifatnya persuasif untuk mengajak masyarakat pedesaan berpartisipasi (berupa komunikasi timbal balik, tatap muka, dan *purposive*) dalam pembangunan.

## 2. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Tenaga

Kemampuan masyarakat dalam merancang pengelolaan Dana Desa masih bersifat kolektif dan terbatas. Faktor tersebut disebabkan oleh jumlah sumber daya manusia yang terbatas serta aspek ketepatan waktu pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan strategi komunikasi pembangunan khususnya kemampuan sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah keputusan bersama. Sedangkan mekanisme kerja pengelolaan Dana Desa diajarkan melalui pelatihan bagi aparatur desa yang biayanya bersumber dari Dana Desa.

Mekanisme kerja pembangunan biasanya di berikan pada pihak ketiga atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Hal ini dibahas pasca adanya penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) dalam bentuk komunikasi kelompok. Adapun pihak ketiga tersebut diprioritas bagi warga desa setempat, jika memang tidak ada, boleh mengambil tenaga ahli dari luar dengan harapan tenaga buruh tersebut masih dari warga setempat. Peran ini termasuk salah satu bentuk realisasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengintruksikan sistem kerja kolaboratif. Arah kerja kolaboratif ditujukan untuk kemandirian desa dimana pembahasan kolaboratif mencakup topik-topik penggunaan sumberdaya alam desa, penggunaan sumberdaya manusia desa, serta pengelolaan aset.

Dari hasil pengamatan tentang keterlibatan masyarakat dalam proses dalam kegiatan pembangunan semakin baik. Pada umumnya, keterlibatan secara tenaga dilakukan oleh para pemuda desa. Mengingat sebagian besar masyarakat Gampong Sereumo berpendidikan rendah dan berprofesi sebagai petani. Selain berprofesi sebagai petani, bermata pencaharian buruh lepas yang memungkinkan secara waktu untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dengan program Dana Desa.

Jumlah kebutuhan tenaga masyarakat untuk kegiatan pembangunan sangat besar. Karena pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Meskipun secara prioritas pemanfaatan dibagi atas pembinaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam wawancara dengan salah seorang masyarakat menyatakan bahwa; “Program-program kegiatan pembangunan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat dan kaum muda biarlah mereka yang mengerjakan. Dan jangan diberikan program pada mereka yang tidak pernah terlibat dalam kegiatan sosial (gotong-royong). Konsep sosial disini masih kita butuhkan”(YI, 9/2018).

Dalam wawancara diatas menjelaskan bahwa, masyarakat mengharapkan mereka dapat terlibat walaupun bukan sebagai tenaga ahli dan hanya sebagai buruh harian dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa atau kegiatan lainnya. Karena dalam masyarakat Aceh konsep tolong-menolong itu menjadi kokoh apabila konsep gotong-royong berlaku tidak hanya bagi yang kuat, akan tetapi juga bagi yang lemah. Misalnya pembangunan talud jalan, jalan usaha tani, dan lain-lain. Bentuk pekerjaan seperti ini menurut masyarakat hanya butuh seorang yang ahli sebagai mandor kegiatan, sedangkan masyarakat bisa terlibat sebagai pekerja/buruh kasar harian dalam kegiatan ini. Kemampuan masih perlu diperkuat untuk menambah rasa memiliki masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pemuda bahwa kesempatan ini pula dijadikan oleh pemuda desa tersebut untuk mengumpulkan dana-dana untuk kegiatan sosial pemuda dengan jumlah tertentu persatu kegiatan. Keuangan ini diluar dari jatah anggaran desa untuk kepemudaan. Sistem pembagian jatah kerja diatur berdasarkan waktu masing-masing pemuda secara bergantian.

Partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan belum sepenuhnya dilakukan karena faktor keterbatasan kemampuan. Adapun konsep padat karya yang dimaksud oleh pemerintah adalah dari/dan/untuk masyarakat dapat menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya dari warga setempat baik tenaga teknis maupun non teknis.

### 3. Partisipasi Sosial Masyarakat

Bentuk partisipasi sosial masyarakat dilambangkan dengan kegotongroyongan, memberi kenyamanan serta dukungan terhadap semua kegiatan pembangunan yang berjalan. Praktik ini merupakan simbol masyarakat desa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Akan tetapi biasanya partisipasi ini kalah dengan praktik dikotomi dalam kepemimpinan desa yang memposisikan masyarakat disfungsi dalam pembangunan desa. Kondisi ini muncul karena adanya kepentingan dari pemerintah desa atau *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Membentuk jarak antara aparat desa dengan masyarakat akan berdampak pada lemahnya rasa memiliki dan pengawasan masyarakat terhadap suatu kegiatan desa. Realita apatisme masyarakat terhadap sebuah kepemimpinan desa sangat erat hubungannya dengan unsur kepemimpinan desa. Padahal budaya kepemimpinan yang demokratis dapat membawa iklim kelembagaan desa menjadi sangat humanis. Hal ini ditunjukkan oleh para pemuda desa dalam pengerjaan kegiatan pembangunan dari program dan desa. Para pemuda desa melakukan pembagian jatah kerja secara bergantian agar semua mendapatkan kesempatan dalam kegiatan desa tersebut. Disamping itu para pemuda desa menyisihkan dari upah harian mereka untuk kegiatan



sosial kepemudaan seperti membantu biaya bagi warga yang sakit dan kegiatan-kegiatan sosial yang lain.

“Saya jangan diberikan jabatan apapun dalam pemerintahan desa ini hingga aparatur desa ini mampu memberikan pertanggungjawaban dengan baik terkait keuangan desa. Kuncinya, masyarakat akan mempercayai kita tatkala kita semua mampu bersikap jujur dalam pengelolaan pemerintahan terutama adalah masalah keuangan” (MR, 9/2018).

Wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat tersebut menggambarkan harapan masyarakat terhadap pemerintah desa untuk lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan desa. Sikap ini muncul karena masyarakat menghendaki perbaikan pada internal organisasi desa terutama dalam hal keterbukaan. Kepuasan masyarakat menjadi indikator penting terhadap penilaian pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga empati masyarakat menjadi salah satu tolak ukur dalam sektor pembangunan non fisik. Merujuk pada Nilakanta dan Schamel (1990), disebutkan bahwa sumber informasi yang berbeda-beda memengaruhi penyebaran inovasi dalam organisasi. Oleh sebab itu, Pace dan Don (2015) dalam konsep manajemen ia menyatakan bahwa manajemen itu memberi ruang untuk terciptanya suatu lingkungan yang mendukung pertukaran informasi secara terbuka.

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tahun 2017 masyarakat mulai memberi respons terkait pengelolaan dana baik dalam musyawarah maupun terhadap hasil pembangunan. Bentuk partisipasi sosial masyarakat ini lahir secara sendirinya setelah merekapaham terhadap peluang dan proses yang ada dilapangan. Gambaran permasalahan yang ada dalam masyarakat Gampong Seureumo dikatakan oleh Saragih (2004) bahwa modal sosial (kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat) merupakan faktor yang signifikan dalam penguatan atau pelemahan partisipasi masyarakat.

Memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa tidak bisa dilakukan dengan cara “kebetulan”, akan tetapi membutuhkan kontinuitas untuk memperoleh tujuan yang sesuai. Komunikasi yang berlangsung kontinyu berfungsi untuk membina internal lembaga supaya bisa berjalan dengan baik. Hardjana (2000) menyatakan bahwa membangun dan memelihara sistem komunikasi yang efektif tersebut merupakan fungsi utama eksekutif organisasi. Karena itu partisipasi muncul ketika kedua pihak saling memberi dan menerima dalam suatu perencanaan bersama.

Pandangan perencanaan dari masyarakat merupakan alternatif dalam membangun konsep komunikasi yang bersifat *bottom-up* karena lebih menyentuh langsung aspirasi masyarakat dibandingkan kepentingan pemerintah desa. Dalam hal ini aparatur desa hanya sedikit melibatkan masyarakat, padahal kunci pembangunan terdapat pada masyarakat itu sendiri. Aspek peran serta dalam kegiatan ini sebenarnya lahir karena faktor budaya “gotong royong” yang melekat pada masyarakat pedesaan. Motivasi termasuk salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi atau terlibat dalam suatu agenda pembangunan.

Bentuk-bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat Gampong Seureumo sebagaimana komunikasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa disajikan dalam Tabel 2. Adapun bentuk gagasan, tenaga dan partisipasi sosial serta mekanisme partisipasi mewujudkan kebermanfaatan dan keberlanjutan proses pengelolaan Dana Desa seperti yang diamanahkan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Tabel 2. Bentuk dan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Desa Seureumo

Bentuk Partisipasi	Mekanisme Partisipasi	Manfaat (Hasil)
Gagasan	Ikut memberi usulan, saran dan pembelaan terhadap program-program prioritas.	Memudahkan aparatur desa dalam menentukan keputusan pembangunan.
Tenaga	Ikut hadir dalam musyawarah dan pengambilan keputusan.	Terlaksanakannya pengambilan keputusan berdasarkan ide bersama dan terwujudnya konsep padat karya dalam masyarakat.
Sosial	Memberikan rasa aman dan menunjukkan dukungan terhadap kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dana desa.	Terwujudnya konsep gotong royong dalam pengelolaan dana desa meski belum maksimal.

Sumber : Analisis Data Primer, 2018.

Semua bentuk partisipasi yang dijelaskan dalam pembahasan diatas terdapat dua bentuk yang tidak terdapat dalam pelaksanaan di Gampong Seureumo yaitu partisipasi harta benda dan partisipasi keterampilan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya jumlah masyarakat yang memiliki keterampilan dan pemberdayaan ekonomi yang bersifat *soft skills*. Adapun *home industry* yang umumnya dikerjakan hanyalah industri jajanan rumahan dan bukan dalam skala besar.

## KESIMPULAN

Perencanaan komunikasi yang dilakukan pemerintah desa pada umumnya dijalankan dalam musyawarah. Dengan demikian hal ini mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Terdapat beberapa bentuk partisipasi dalam Gampong Seureumo diantaranya partisipasi dalam bentuk gagasan, tenaga, serta partisipasi sosial. Proses tersebut terlaksana secara bertahap menyesuaikan tingkat komunikasi yang dinamis di kalangan masyarakat desa. Dua bentuk partisipasi yang tidak muncul dari masyarakat dalam proses desain dan implementasi strategi komunikasi aparatur desa yaitu partisipasi harta benda dan partisipasi keterampilan. Partisipasi dalam bentuk gagasan dapat dilihat bagaimana peran serta masyarakat dalam memberikan pandangan terhadap usulan usulan yang berkaitan dengan wacana pembangunan. partisipasi sosial dan tenaga terwujud dalam sikap kegotongroyongan masyarakat desa dalam menjalankan dan mengawasi seluruh mekanisme yang dilaksanakan pada semua tahap pengelolaan dana desa.

## Daftar Pustaka

- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat Diera Global*. Alfabeta; Bandung. 2013.
- Artha, Ardian. *Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa*. Tesis. Yogyakarta; UGM. 2018.
- Cook, M., Caithlin, L., McCarthy, M., Mischler, K. *Guidelines For The Development Of A Communication*. Worcester: Worces Polytechnic Institute. 2014.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. Yogyakarta. Gadjah Mada Press.
- Effendy, Onong. U. *Hubungan Masyarakat*, Bandung; Remaja Rosdakarya. 2008.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Penerbit Humaniora. 2004.
- Hardjana, Andre. *Audit Komunikasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Grasindo. . 2000.
- Huraerah, Abu. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat; Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung; Humaniora. 2008.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Agama Dan Humaniora*. Yogyakarta; Paradigma. 2012.
- Laksana, Nuring S. 2013. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Privinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, Nomor 1. Hlm. 56-67.
- Mefalopulos, Paulo. *Development Communication Sourcebook: Broadening the Bourndaries of Commmunication*. Washington D.C: The World Bank. 2008.
- Ndraha, Talizuduhu. *Pembangunan Masyarakat; Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta; PT Renika Cipta. 1990.
- PNPM Mandiri. *Pedoman Umum PNPM-Mandiri*. Jakarta. 2007.
- Pace & Faules. *Komunikasi Organisasi; Strategi meningkatkan kinerja perusahaan*. Bandung; Remaja Rosdakarya. 2015.
- Saragih, Tumpal P. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa; Alternatif Pemberdayaan Desa*. Jakarta; CV. Cipruy. 2004.